

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan ketiga, 2011
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995
- Fajar, Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2004
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Jilid I, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991
- Hidayat, *Materialisme Historis*, Yogyakarta: Pena Hikmah, 2013
- Jacques Rousseau, Jean, *Du Contract Sosial (Perjanjian Sosial)*, Penyunting Nino Cicero, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka:, Cetakan kedua, 2008
- Joachim Friedrich, Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Diterjemahkan dari Buku Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective* (The University of Chicago Press, 1969), Bandung: Nusa Media, 2010
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012
- Mustari, A. Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Bandar Maju, 2003
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014
- _____, dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, 2011
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Syamsyudin, M. , *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga, 2002
- Wignjotosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Nasional ke Hukum Nasional*, Jakarta: HuMa, 2014

Artikel Ilmiah

- Endrawati, Netty, *Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum*, Wastu, Volume Khusus, Desember 2007, 42-51
- Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan keadilan terkait dengan sttus MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Penelolan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012
- Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Disusun Oleh Tim Kerja Dibawah

Pimpinan Dr. Herlambang P Wiratraman, S.H., Ma, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2014

Lubis, Solly, *Pembangunan Hukum Nasional, Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan* Diselenggarakan Oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003

M. Hadjon, Philipus, *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan*, makalah disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 9 – 10 Juni 2004

Riyanto, Astim, *Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah yang Disajikan dalam Pra Perkuliahan Program Strata Dua (S2) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Setelahsarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun Akademik 2007/2008 27 Agustus 2007, Program Studi Pendidikan Kswarganegaraan Sekolah Setelahsarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2007

Sugangga, IGN., *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan, disampaikan dalam Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Perdata (Adat) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 27 November 1999

Sugondo, Lies, *Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam *Advanced Training* Hak-hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples' Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia di Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007

Zakaria, R. Yando, *Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945 dengan tema “Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah?”. Diselenggarakan di Jakarta, tanggal 9-10 Oktober 2012. Khususnya pada Panel 6 yang bertajuk “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia”, yang dikelola oleh Perhimpunan untuk Hukum dan Masyarakat (HuMA)

Makalah

Riyanto, Astim, *Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah yang Disajikan dalam Pra Perkuliahan Program Strata Dua (S2) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Setelahsarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun Akademik 2007/2008 27 Agustus 2007, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Setelahsarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2007

Internet

Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, http://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, diakses pada 28 Agustus 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor VI/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Undang-Undang Nomoer 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007. Nomor 84)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Naskah Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah*
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara

*Republik Indonesia (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan),
Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Bab IV
tentang Pembahasan Perubahan UUD 1945 mengenai Pemerintahan
Daerah, 2010*

